



Jl. Nuansa Mas Raya No. 2, Kel. Cipamokolan
Kec. Rancasari, Kota Bandung 40292
E-mail: bandungbawaslukota@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANDUNG
NOMOR : 006/HK.01.01/K.JB-19/05/2024
TENTANG PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA se - KOTA BANDUNG
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT**

Menimbang : a. Bahwa untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, maka perlu membentuk Panwaslu Kelurahan /Desa pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. Dalam rangka pembentukan Panwaslu Kelurahan /Desa, Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Kelompok Kerja (Pokja)

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung tentang Penetapan Kelompok Kerja Panwaslu Kelurahan /Desa se- Kota Bandung pada Pemilihan Tahun 2024

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 1078),
)

4. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 215/HK.01.01/K1/05/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Panwaslu Kelurahan /Desa se-Kota Bandung pada Pemilihan serentak Tahun 2024.
- KEDUA : Kelompok Kerja Panwaslu Kelurahan /Desa se- Kota Bandung pada Pemilihan Tahun 2024 mempunyai Tugas dan Kewajiban sebagai berikut:
Tugas Kelompok Kerja:
1. Melaksanakan proses pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Menyusun rencana kerja pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa;
 3. Melaksanakan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan /Desa yang terdiri atas;
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan /Desa
 - b. Mensosialisasikan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan /Desa kepada seluruh kelompok masyarakat termasuk, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok masyarakat adat.
 - c. Menerima pendaftaran dan berkas administrasi pendaftaran
 - d. Meneliti berkas administrasi pendaftaran;
 - e. Mengumumkan hasil penelitian berkas administrasi;
 - f. Menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat;
 - g. Memfasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang dilakukan Anggota Bawaslu Kab/Kota; dan
 - h. Melaporkan hasil pelaksanaan seleksi ke BawasluKabupaten/Kota

Kewajiban Kelompok Kerja:

1. Memastikan pelaksanaan proses pembentukan Panwaslu Kelurahan /Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Menjaga kerahasiaan; dan
3. Melaporkan kegiatan pembentukan Panwaslu Kelurahan /Desa kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

KETIGA : masa tugas Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 2 (dua) bulan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal 17 Mei 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



DIMAS ARYANA ISKANDAR

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandung
Nomor : 006/HK.01.01/K.JB-19/05/2024
Tanggal : 17 Mei 2024

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN /DESA
KOTA BANDUNG
PADA PEMILIHAN TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Ketua		
	Muhammad Adriansyah Prayuda, S.H	Anggota Bawaslu	Ketua
II	Sekretaris		
	Bonie Nugraha Permana, S.Sos.,M.AP	Staff ASN	Sekretaris
III	Anggota		
	Dimas Aryana Iskandar, S.H	Ketua Bawaslu	Anggota
	Bayu Mochamad, S.Hum	Anggota Bawaslu	Anggota
	Muhamad Sopian, S.H., C.Med	Anggota Bawaslu	Anggota
	Indra Prasetyo Hardian, S.H	Anggota Bawaslu	Anggota
	Febriyanto	BPP Bawaslu	Anggota
	Candra Dinnah Nur Tristiyani,S.E	Staff Divisi SDMO	Anggota
	M.Arief, S.H	Staff Divisi SDMO	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BANDUNG
KETUA,

DIMAS ARYANA ISKANDAR

- Tembusan Kepada Yth.:
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
 - 2. Anggota POKJA yang bersangkutan;
 - 3. Arsip .